

Editor: Agus Hendrayady, S.Sos, M.Si



REFORMASI ADMINISTRASI *Publik*



Ade Putra Ode Amame, S.Sos., M.Si. | Aulia Rahmawati, S.A.N., M.Si.
Masayu Nila Juwita, S.I.P., M.Si. | Ir. Tungga Bhimadi Karyasa, M.
Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si. | Dr. Malik, M.Si. | Dwi Andriyani, S.Sos., M.Si.
Yuni Annisa Listya Padmasari S.ST. | Ayu Lestari, S.Sos., M.A.P.
Surjanto, SKM. MKM. | Dr. Ade Iskandar, S.I.P., M.Si. | Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si.
Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si. | Dr. Ani Heryani, S.Sos, M.Si.

REFORMASI ADMINISTRASI *Publik*

Reformasi sudah sejak lama didengungkan di Indonesia, sehingga kemudian Indonesia memasuki era Reformasi yang menggantikan Era Orde Baru. Pemerintah menginginkan adanya Reformasi di setiap bidang, demikian pula halnya Administrasi Publik. Reformasi yang berasal dari Bahasa Inggris, *Reformation* atau Bahasa Belanda, *Reformatie*, memberikan arti melakukan perubahan, perbaikan, penataan, dan pengaturan. Demikian pula halnya dengan Reformasi Administrasi Publik yang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan direncanakan dalam rangka perubahan terhadap struktur dan prosedur birokrasi. Buku ini merupakan penulisan bersama dari para akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya dan ditulis secara teoritis dan praktis disertai contoh penerapannya. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya Reformasi Administrasi Publik.

Buku ini terdiri dari 14 bab yang membahas materi tentang Memahami Administrasi dan Administrasi Publik, Konsep Dasar Reformasi dan Reformasi Administrasi Publik, Sejarah Perkembangan Paradigma Administrasi Publik, Administrasi Publik Idea, Patologi Administrasi Publik, Lingkup Reformasi Administrasi Publik, Tipe-Tipe Reformasi Administrasi Publik, Sejarah Reformasi Administrasi Publik, Masalah-Masalah Administrasi Publik, Reformasi Aparatur Negara, Reformasi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi Pemerintah, dan Reformasi Kinerja, serta Reformasi Organisasi.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-151-708-1



REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.

Aulia Rahmawati, S.A.N., M.Si.

Masayu Nila Juwita, S.I.P., M.Si.

Ir. Tungga Bhimadi Karyasa, M.

Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.

Dr. Malik, M.Si.

Dwi Andriyani, S.Sos., M.Si.

Yuni Annisa Listya Padmasari S.ST.

Ayu Lestari, S.Sos., M.A.P.

Surjanto, SKM. MKM.

Dr. Ade Iskandar, S.I.P., M.Si.

Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si.

Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si.

Dr. Ani Heryani, S.Sos, M.Si.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis : Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si | Aulia Rahmawati, S.A.N., M.Si. | Masayu Nila Juwita, S.I.P., M.Si | Ir. Tungga Bhimadi Karya, M. | Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si | Dr. Malik, M.Si | Dwi Andriyani, S.Sos., M.Si | Yuni Annisa Listya Padmasari S.ST | Ayu Lestari, S.Sos., M.A.P | Surjanto, SKM. MKM | Dr. Ade Iskandar, S.I.P., M.Si | Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si | Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si | Dr. Ani Heryani, S.Sos, M.Si

Editor : Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Revita Amalia

ISBN : 978-623-151-708-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Ketika kita melangkah ke dalam kompleksitas zaman ini, reformasi administrasi publik telah menjadi buah bibir yang tak terelakkan. Transformasi fundamental ini menggugah sendiri esensi pelayanan publik, membangun fondasi yang kokoh untuk mewujudkan visi sebuah masyarakat yang lebih adil, efisien, dan inklusif. Reformasi administrasi publik tidak sekadar sekumpulan kebijakan atau perubahan prosedur, melainkan sebuah revolusi intelektual yang menuntut kolaborasi terus-menerus, inovasi, dan adaptasi terhadap perubahan yang tak pernah berhenti. Di dalamnya terkandung semangat untuk menyegarkan arus vitalitas pemerintahan, menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta memupuk daya saing bangsa di panggung global.

Melalui mata rantai reformasi ini, kita menuntut efisiensi birokrasi, menggalang partisipasi masyarakat, dan membuka pintu lebar-lebar bagi gagasan-gagasan segar yang mengubah paradigma tradisional. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan tekad dan ketekunan, tetapi hasilnya, tanpa diragukan, akan memperteguh fondasi negara kita menuju masa depan yang lebih cerah. Dalam buku ini, kami membahas secara mendalam perubahan mendesak ini, menganalisis langkah-langkah strategis, dan menyoroti contoh-contoh gemilang dari berbagai belahan dunia. Mari kita bersama-sama menjelajahi jalan menuju pemerintahan yang lebih responsif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Muta'allim, S.S., M.Li

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 MEMAHAMI ADMINISTRASI DAN	
ADMINISTRASI PUBLIK	1
A. Pengantar Administrasi dan Administrasi Publik	1
B. Tujuan dan Manfaat Memahami Administrasi Publik.....	2
C. Peran Administrasi Publik dalam Masyarakat.....	4
D. Tantangan Global dalam Administrasi Publik	6
E. Perubahan Paradigma dalam Administrasi Publik.....	7
F. Implikasi Teknologi dan Inovasi terhadap Administrasi Publik	9
G. Masa Depan Administrasi Publik.....	11
H. Kesimpulan.....	12
I. Daftar Pustaka	14
BAB 2 KONSEP DASAR REFORMASI DAN REFORMASI	
ADMINISTRASI PUBLIK	16
A. Pendahuluan.....	16
B. Konsep Reformasi	17
C. Reformasi Administrasi Publik.....	19
D. Reformasi Administrasi Publik Di Negara Berkembang.....	24
E. <i>Dynamic Governance</i>	27
F. Daftar Pustaka	32
BAB 3 SEJARAH PERKEMBANGAN PARADIGMA	
ADMINISTRASI PUBLIK	34
A. Paradigma Administrasi Publik.....	34
B. Dari Teori ke Paradigma.....	36
C. Konsep Paradigma	38
D. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik	40
E. Daftar Pustaka	48

BAB 4 ADMINISTRASI PUBLIK IDEA	51
A. Pengantar	51
B. Idea Lingkup Administrasi Publik.....	52
C. Contoh Idea Reformasi Lingkup Administrasi Publik	54
D. Keterkaitan Idea Reformasi.....	64
E. Daftar Pustaka	64
BAB 5 PATOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK.....	65
A. Pendahuluan	65
B. Patologi dan Patologi Administrasi Publik	66
C. Ruang Lingkup Patologi Administrasi Publik	68
D. Kategori Patologi Administrasi Publik	69
E. Faktor-Faktor Penyebab Patologi Administrasi Publik	73
F. Upaya Penanggulangan Masalah Patologi Administrasi Publik.....	75
G. Penutup.....	79
H. Daftar Pustaka	80
BAB 6 LINGKUP REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.....	82
A. Pendahuluan	82
B. Perkembangan Reformasi Administrasi	86
C. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	93
BAB 7 TIPE-TIPE REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK.....	99
A. Pendahuluan	99
B. Ringkasan	114
C. Daftar Pustaka	114
BAB 8 SEJARAH REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK ...	116
A. Pendahuluan	116
B. Definisi Administrasi Publik.....	117
C. Konsep Reformasi Administrasi Publik.....	119
D. Ruang Lingkup Administrasi Publik	121
E. Pelayanan Publik dalam Reformasi Administrasi Publik	124
F. Pengertian Reformasi Administrasi Publik	125
G. Perubahan Paradigma Pelayanan Publik	126
H. Reformasi Administrasi Publik Di Indonesia.....	127

I.	Sejarah Reformasi Administrasi di Indonesia.....	128
J.	Daftar Pustaka	129
BAB 9	MASALAH ADMINISTRASI PUBLIK.....	130
A.	Pendahuluan.....	130
B.	Pengertian Dan Konteks Pelayanan Publik	131
C.	Masalah Administrasi Publik Di Indonesia	133
D.	Peranan <i>E-Goverment</i> Dalam Pelayanan Publik.....	136
E.	Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik.....	139
F.	Kesimpulan	142
G.	Daftar Pustaka	143
BAB 10	REFORMASI APARATUR NEGARA	145
A.	Pendahuluan.....	145
B.	Reformasi Aparatur Negara	146
C.	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Aparatur Negara ...	163
D.	Daftar Pustaka	165
BAB 11	REFORMASI PELAYANAN PUBLIK.....	167
A.	Pelayanan Publik Dalam Perspektif NPM dan NPS ..	167
B.	Penataan Aparatur dalam Reformasi Pelayanan Publik.....	170
C.	<i>Privatisasi</i>	173
D.	Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia	175
E.	Daftar Pustaka	179
BAB 12	REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH.....	182
A.	Makna dan Fokus Reformasi Birokrasi Pemerintahan.....	182
B.	Konseptualisasi dan Reposisi Birokrasi Pemerintahan.....	183
C.	Pembaharuan Sistem Birokrasi Pemerintahan	186
D.	Pembaharuan Kelembagaan Pemerintahan.....	187
E.	Pembaharuan Manajemen Pemerintahan	188
F.	Perilaku Aparatur Birokrasi Pemerintahan	189
G.	Esensi Strategis Birokrasi Pemerintahan	190
H.	Daftar Pustaka	191

BAB 13 REFORMASI KINERJA	192
A. Ruang Lingkup Reformasi Kinerja.....	192
B. Implementasi Reformasi Kinerja	195
C. Evaluasi Terhadap Kinerja.....	197
D. Dukungan dan Hambatan.....	199
E. Daftar Pustaka.....	202
BAB 14 REFORMASI ORGANISASI.....	204
A. Reformasi Sektor Publik.....	204
B. Reformasi dan Reorganisasi.....	209
C. Reformasi Organisasi di Indonesia	213
D. Daftar Pustaka.....	216
TENTANG PENULIS	218



REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si.

Aulia Rahmawati, S.A.N., M.Si.

Masayu Nila Juwita, S.I.P., M.Si.

Ir. Tungga Bhimadi Karyasa, M.

Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.

Dr. Malik, M.Si.

Dwi Andriyani, S.Sos., M.Si.

Yuni Annisa Listya Padmasari S.ST.

Ayu Lestari, S.Sos., M.A.P.

Surjanto, SKM. MKM.

Dr. Ade Iskandar, S.I.P., M.Si.

Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si.

Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si.

Dr. Ani Heryani, S.Sos, M.Si.



BAB 1

MEMAHAMI ADMINISTRASI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Luwuk, Kab. Banggai

Email: putrohade@gmail.com

A. Pengantar Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi adalah suatu disiplin ilmu dan praktik yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Administrasi tidak hanya terbatas pada organisasi bisnis, tetapi juga mencakup organisasi publik, lembaga pemerintah, dan sektor non-profit.

Administrasi Publik adalah cabang administrasi yang khusus berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sektor publik. Administrasi publik melibatkan perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat. Administrasi publik berfokus pada aspek-aspek seperti efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Meskipun ada kesamaan dalam prinsip-prinsip administrasi antara sektor publik dan swasta, ada beberapa perbedaan penting antara keduanya. Administrasi publik beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi yang ketat, dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan

I. Daftar Pustaka

- Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Eureka Media Aksara.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., Koni, A., Fitriani, Kutoyo, M. S., Enala, S. H., Mana, F. A., Suandi, Putro, S. E., Utami, N. M. S., Luturmas, Y., & Matitaputty, M. I. (2023). *Administrasi Kepegawaian* (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Andriansyah. (2015). *Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Kajian dan Analisa*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu Politik Universitas Prof. dr. moestopo Beragama.
- Anggara, S. (2016a). *Administrasi Kepegawaian Negara* (Pertama). CV Pustaka Setia.
- Anggara, S. (2016b). Ilmu Adminsitrasi Negara. In *Cv Pustaka Setia*.
- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara* (Pertama). Pustaka Setia.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). Admnistrasi Pembangunan Teori dan Praktik. In B. A. Saebani (Ed.), *Pustaka Setia* (Pertama).
- Hadijaya, Y. (2012). *Administrasi Pendidikan* (Pertama). Perdana Publishing.

- Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralia, S., Afriyanni, Yuliana, ... Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Indra Muchlis Adna, & Hamim, S. (2013). *ADMINISTRASI, ORGANISASI DAN MANAJEMEN Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi* (R. Wahidi (ed.); REVISI). Trussmedia Grafika.
- Kartiwa, A. (2012). *Perbandingan Administrasi Negara* (B. A. Saebani (ed.); Pertama). Pustaka Setia.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara* (R. Kurniawan, B. Rahman, & B. Rahman (eds.); Pertama). Unimal Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (E. Chaidir (ed.); Pertama). Marpoyah Tujuh Publishing.
- Rosyadi, S., & Yusuf, M. (2021). *Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data* (S. Rosyadi, R. A. Nugroho, M. Yusuf, & M. Yusuf (eds.); Pertama). SIP Publishing.
- Thoha, M. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* (Pertama). Kencana Prenada Media Group.
- Zahari, A. F. M., Sagena, U., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Hendrayady, A., Irawan, B., Tendi, Fkun, E., Sriharyati, S., Suhariyanto, D., Katili, A. Y., & Agusman, Y. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

BAB 2

KONSEP DASAR REFORMASI DAN REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Aulia Rahmawati, S.A.N., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Universitas Bandar Lampung

Email: aulia@ubl.ac.id

A. Pendahuluan

Administrasi seringkali hanya didefinisikan sebagai kegiatan tulis menulis. Kegiatan pengadministrasian memang lebih banyak pada kegiatan tulis menulis, baik cara manual maupun secara digital dengan bantuan komputer. Lebih dari itu banyak teori yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi lebih dari sekedar kegiatan tulis menulis atau catat mencatat. Secara sempit administrasi sering diartikan dengan tata usaha, yaitu kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan hasil kegiatan sebagai data dan informasi yang akan digunakan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan secara luas ruang lingkup administrasi menyangkut hal-hal yang termasuk dalam bagian dan bahasan dari administrasi tersebut.

Ruang lingkup administrasi secara luas meliputi organisasi, manajemen, kepemimpinan, keuangan, kepegawaian, tata usaha, tata hubungan, perlengkapan dan perwakilan. Apabila mengangkat masalah administrasi dan ruang lingkungnya di Indonesia, kenyataannya banyak yang perlu untuk diperbaiki karena administrasi di Indonesia tidak dijalankan secara murni. Administrasi semestinya dapat

pengalaman bangsa kita dan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa birokrasi tidak serta-merta dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya tersebut secara otomatis dan independen serta menghasilkan kinerja yang signifikan. Dibutuhkan keinginan dan konsistensi yang kuat dari para aktor dan elit di pemerintahan dalam menjalankan reformasi birokrasi dalam rangkaian reformasi administrasi publik.

F. Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal, 2006, *Dinamika Reformasi dan Revitalisasi di Indonesia*, Suara Bebas. Jakarta
- Caiden, G. E. (1969). *Administrative reform*. London: Allen Lane The Penguin Press.
- Chau, D. M. (1997). *Administrative reform in Vietnam: Need and strategy*. *Asian Journal of Public Administration*, 19(2), December.
- Dror, Y. (1976). *Strategies for administrative reforms*. In L. F. Ann, *The management of change in government*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Hidayat, L. Misbah, 2007, *Reformasi Administrasi : Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mariana, Dede, 2009. "Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia" Dalam Makalah Utama Konferensi Administrasi Publik, Surabaya, Mei 2009, hal 1-19
- Meutia, I.F., 2017. *Reformasi Administrasi Publik*. Aura Publishing; Lampung.

- Ndue, P. N (2005) *Democratization, Good Governance and administration Reform in Africa. The Enabling State and The Role of The Public Service in The Wealth Creation: From:* <http://unpan1.un.org./intradoc/groups/public/document/AAPAM/UNPAM02713.pdf>
- Neo, B.S. & Chen, G. 2007. *Dynamic Governance: Embedding, Capabilities and Change in Singapore.* Singapore: Word Scientific Publishing Co.Pte,Ltd.
- Ningsih, Yulia et al. 2019. *Reformasi Administrasi Publik.* Lakeisha; Klaten.
- Peljhan, D. and Tekavcic, M. (2008), *The Impact of Management Control Systems - Strategy Interaction on Performance Management: A Case Study."* *Organizacija*, Volume 41 Research papers Number 5, September- October 2008.
- Prasojo, E. (2003). *Agenda politik dan pemerintahan di Indonesia: Desentralisasi politik, reformasi birokrasi, dan good governance.* *Bisnis dan Birokrasi*, XI (1), Januari.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: CV Mandar Maju.
- Wibawa, Samodra, 2005, *Reformasi Administrasi : Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/ Publik,* Yogyakarta, Gava Media.
- Widjaja. (2011). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan.* Jakarta : Pustaka LP3ES

BAB 3

SEJARAH PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK

Masayu Nila Juwita, S.I.P., M.Si.

Dosen Program Studi Administrasi Publik

Universitas Bandar Lampung, Lampung

Email: masayu@ubl.ac.id

A. Paradigma Administrasi Publik

Semula pada tahun 1970an Nicholas Henry menyajikan 5 paradigma administrasi publik, yakni yang pertama adalah *paradigm of dichotomy politics and administration* (sejak tahun 1900 hingga 1926), yang kedua adalah *paradigm of administrative principles* (sejak 1927 hingga 1937), yang ketiga adalah *paradigm of public administration as politics* (sejak 1950 hingga 1970), dan yang keempat adalah *paradigm of public administration as administration* (sejak 1950 hingga 1970), serta yang kelima adalah *paradigm of public administration as public administration* (sejak 1970 hingga 1990). Perkembangan mutakhir dari paradigma administrasi publik disampaikan oleh Nicholas Henry dalam bukunya yang telah direvisi (*13th edition*) pada tahun 2018 bahwa sudah muncul paradigma baru dalam administrasi publik yakni *paradigm of public administration as governance* (sejak 1990). Paradigma terakhir ini menegaskan bahwa sebelum era *governance* maka semua paradigma sebelumnya cenderung berorientasi pada *government* (Henry, 2018). Pusat perhatian administrasi publik semata pada sektor pemerintah saja dan

lingkungan (*external system*) yang muncul dalam setiap proses penyelenggaraan berbagai tugas pemerintahan.

Pada hakekatnya masalah-masalah tersebut secara sistemik bertalian erat satu sama lain, dan dapat disederhanakan sebagai permasalahan kelembagaan, organisasi, sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana administrasi. Pembangunan administrasi publik pada hakekatnya terarah pada upaya mengatasi berbagai permasalahan empirik yang dihadapi sistem administrasi publik, baik yang muncul dalam sistem internal maupun dalam kaitannya dengan interaksi sistem dengan lingkungannya. Diharapkan, berbagai paradigma tersebut dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan empirik tersebut sehingga proses pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang harus dilakukan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

E. Daftar Pustaka

- Henry, N. (2018). *Public administration and public affairs* (13th ed.). New York: Routledge.
- Kuhn, T.S. (2012). *The structure of scientific revolution* (4th ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Mustopadidjaja, A. R. (2013). *Paradigma-Paradigma Pembangunan dan Saling Hubungannya Dengan Model, Strategi Dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan*. Lembaga Administrasi Negara.
- Mufiz, A. (1986). *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka.
- Sardjudin, K. N. (1995). *Pengaruh Pendelegasian Wewenang Sebagai Bagian Esensial Manajemen Strategi Terhadap Peningkatan Produktivitas Organisasi: Studi Tentang*

Model Pendelegasian Wewenang Pada Beberapa Unit Swadana Dalam Sistem Administrasi Negara Di Indonesia: disertasi. Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran.

Kuhn, Thomas S., *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, USA: Chicago University Press, 1970:111-135.

LAN dan BPKP. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi publik, 2000:7-8.

Litchfield, Edward H, *Notes on a General Theory of Administration*, Administrative Science Quarterly, Vol. I, 1956.

Merriam-Webster, *Webster's New Collegiate Dictionary*. Springfield, Massachusetts, USA: G & C Merriam Company, 1977-830.

Mufiz, Ali, *Buku Materi Pokok Pengantar Administrasi publik*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1984-1985 dalam Bintoro Tjokroamidjojo, *Ibid*, hal. 20

Mustopadidjaja, *Paradigma-Paradigma Pembangunan*. Jakarta: Lembaga Administrasi publik Republik Indonesia, 2002, hal.3-4.

Nisjar, Karhi S., *Pengaruh Pendelegasian Wewenang Sebagai Bagian Esensial Manajemen Strategi Terhadap Peningkatan Produktivitas Organisasi*, disertasi program doktor. Bandung: Universitas Padjadjaran, 1995:43-57.

Osborne, David and Peter Plastrik, *Banishing Bureaucracy*. Reading, MA: Addison- Wesley Publishing Company, 1997.

Osborne, David and Ted Gaebler, *Reinventing Government* Reading, MA: A Plume Book, 1992.

Robbins, Stephen P., *The Integrative Process: Integrating Theory and Practice*. New Delhi: Prentice-Hall of India Private Limited, 1976:47.

Thoha, Miftah, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Thoha, Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi publik*.

BAB 4 | ADMINISTRASI PUBLIK IDEA

Ir. **Tungga Bhimadi Karyasa, M.T.**
Dosen Jurusan Teknik Mesin
Universitas Gajayana Malang
Email: tunggabhimadi2@gmail.com

A. Pengantar

Kata *idea* merupakan resapan dari bahas Inggris yang berarti *ide* atau *gagasan*. Merujuk judul buku *Reformasi Administrasi Publik*, pemunculan idea yang bersifat biasa apalagi idea reformis, tentu mendapat tidak sedikit tantangan. Bagaimanapun ide atau gagasan tersebut, harus *dicari* dan *dimunculkan* dengan baik spontan maupun terstruktur dan baik itu dari diri sendiri maupun berkelompok atau bisa jadi baru maupun aktual atau pengembangan yang sudah ada.

Ramuian idea yang sudah matang, dikembangkan dan diaplikasikan dengan tujuan kearah yang melakukan reformasi sesuai harapan, misalnya harapan untuk berbeda atau perbaikan dari sebelumnya. Dengan reformasi tersebut, Administrasi Publik dari pemunculan beragam Idea ini, diharapkan menjadikan pelaksanaan system berikutnya menjadi lebih: efisien, efektif, mudah, dan sederhana, dengan tetap dengan mengikuti *Sistem Ketatanegaraan* yang berlaku.

dan mengembangkan organisasi yang dipimpin, dalam koridor etika untuk Administrasi Publik.

- e. Sebagai panutan dan sebagai agen perubahan dalam tubuh organisasi.

D. Keterkaitan Idea Reformasi

Reformasi idea yang dimunculkan dalam lingkup tertentu dan khas pada *Administrasi Publik* untuk kepentingan masyarakat luas, dapat dikaitkan dengan lingkup yang lain sehingga membentuk pelayanan terpadu yang umumnya dalam satu pintu, misalnya sekali datang dengan persyaratan cukup dapat menghasilkan beberapa bentuk perijinan yang dibutuhkan.

Keterkaitan Idea Reformasi antar lingkup ini, ditunjukkan dengan perubahan pelayanan kearah antara lain:

1. Menunjukkan pelayanan lebih efisien,
2. Mempunyai standar waktu dan biaya jelas,
3. Prosedur pelayanan lebih sederhana dari sebelumnya,
4. Kemudahan diakses,
5. Menuju pengurangan biaya bahkan gratis.

Keterkaitan Idea Reformasi ini, dapat membentuk administrasi publik dalam pola pelayanan secara:

1. Fungsional yang terbagi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan
2. Terpusat yang memberikan layanan khas dengan khusus untuk satu masalah
3. Terpadu satu atap
4. Terpadu satu pintu

E. Daftar Pustaka

Azman (2021). *Inilah Beberapa Cara Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Penerbit Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

BAB 5

PATOLOGI ADMINISTRASI PUBLIK

Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: agushendrayady5873@umrah.ac.id

A. Pendahuluan

"Jika bisa dilakukan dengan susah payah, mengapa harus dengan mudah?" adalah istilah atau pemeo yang sering kita dengar di masyarakat terhadap pelayanan yang diterima oleh pejabat (aparatur) pemerintah. Mendengar istilah atau pemeo tersebut seringkali membuat masyarakat ragu bahkan cenderung enggan berurusan dengan pemerintah.

Di era reformasi sekarang ini, diharapkan pemerintah mampu menyisihkan bahkan menghilangkan istilah atau catatan "Jika bisa dilakukan dengan susah payah, mengapa harus dengan mudah?", menjadi lawan istilah atau pemeo yaitu "Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?". Upaya menghilangkan bahkan meniadakan istilah-istilah atau stereotype negatif dapat meningkatkan citra pemerintah terhadap pelayanan publik secara umum dan menghilangkan penyakit administrasi publik atau yang lebih kita kenal sebagai Patologi Administrasi Publik.

acuan efektivitas kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

H. Daftar Pustaka

- Ali, H. Faried dan Baharuddin, (2014), *Ilmu Administrasi dalam Pendekatan Hakikat Inti*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hendrayady, Agus, (2021), *Etika Administrasi Negara (Edisi 2)*, Umrah Press, Tanjungpinang.
- Hendrayady, Agus, et al. (2022), *Pengantar Ilmu Administrasi Publik*, Agus Hendrayady, (ed)., Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Ismail, HM., (2009), *Politisasi Birokrasi*, Ash-Shiddiqy Press, Malang.
- Makmur, H., (2007). *Patologi serta Terapinya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Refika Utama, Bandung.
- Mufiz, Ali, (2015), *Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Modul UT)*, Universitas Terbuka, Banten.
- Nurtjahjo, Hendra, et al, (2013), *Memahami Mal-Administrasi, Ombudsman Republik Indonesia*, Jakarta.
- Prabowo, Hadi, (2022), *Birokrasi dan Pelayanan Publik*, Bimedia Pustaka Utama, Bandung.
- Putri, Nur Aslamaturrahmah Dwi, (2017), *Birokrasi Pemerintahan*, Umrah Press, Tanjungpinang.
- Razak, Muhammad Rais Rahmat, et al, (2021), *Reformasi Administrasi Publik*, Agus Hendrayady (ed)., Media Sains Indonesia, Bandung.
- Rijono dan Sugeng Suharto, (2017), *Hambatan Birokrasi dalam Melaksanakan Tugas (Studi Patologi Birokrasi pada Pegawai Kantor Camat Talo Kecil Kabupaten Seluma)*, Jurnal

Governance dan Administrasi Publik, Vol. 1 No. 1 (April 2017).

Rusfiana, Rudi dan Cahya Supriatna, (2021), *Memahami Birokrasi Pemerintahan dan Perkembangannya*, Alfabeta, Bandung.

Sukidin, dan Damai Darmadi, (2011), *Administrasi Publik*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.

Syafeii, Inu Kencana dan Welasari, (2015), *Ilmu Administrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Thoha, Miftah, (2005), *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

BAB 6 | LINGKUP REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Malik, M.Si.
Universitas Bandar Lampung
Email: malik@ubl.ac.id

A. Pendahuluan

Pelaksanaan reformasi adalah untuk merubah tatanan kehidupan kearah yang lebih baik, Reformasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Jika reformasi dilihat dari pandangan hukum, maka reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara, demikian juga reformasi bila dilihat dari segi administrasi, maka reformasi mdapat dikatakan perubahan secara drastis sistem pemerintahan yang ada dalam suatu negara. Dengan demikian bahwa reformasi administrasi secara ideal merupakan suatu situasi yang diharapkan dari aktor administrasi publik yang menunjukkan perilaku kondusif terhadap pelaksanaan pemerintahan melalui penerapan sistem demokrasi. Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi menjadi nilai yang harus diadopsi dalam sistem administrasi publik secara komprehensif. Untuk dapat menyehatkan kembali administrasi publik, maka seluruh aktivitas pembenahan di berbagai bidang yang sesuai dengan perkembangan saat ini, dengan melakukan reformasi.

BAB 7 | TIPE-TIPE REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Dwi Andriyani, S.Sos., M.Si
Universitas Sjakhyakirti Palembang
Email: dwidedek291@gmail.com

A. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan negara-negara di dunia yang semakin pesat dengan disertai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta penerapannya pada berbagai bidang kehidupan telah mendorong persaingan global menjadi semakin ketat, dan masyarakat semakin peka terhadap peningkatan kualitas hidupnya, menuntut dilakukan reformasi secara menyeluruh. Reformasi (*Reform*) menjadi kata kunci bagi perubahan ke arah perbaikan, jika tidak ke arah pembaruan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah. Reformasi administrasi publik merupakan salah satu bagian kajian dari pada administrasi yang selalu menarik perhatian untuk diteliti dan dikaji karena berkaitan dengan adanya pergeseran ilmu administrasi yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan Administrasi Publik merupakan hasil respons terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan ekologi administrasi public (Mubarok, 2019).

pencapaian visi dan misi sebagai landasan kerja birokrasi (Budiman, 2005).

B. Ringkasan

Keberhasilan reformasi telah banyak ditunjukkan oleh negara-negara baik itu negara maju maupun berkembang di masa yang lalu. Konsep reformasi administrasi memiliki pengertian yang luas sehingga tidak dapat dijelaskan dalam satu definisi tunggal. Secara Tradisional, Reformasi Administrasi diidentikkan dengan usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. dalam arti sempit tujuan reformasi administrasi adalah untuk menyempurnakan administrasi. Hann Been Lee dalam (Zauhar,2007:13) menyatakan bahwa tujuan reformasi administrasi yang ia spesifikasikan secara umum yakni meningkatkan keteraturan, meningkatkan atau menyempurnakan metode dan meningkatkan *performance* (unjuk kerja). Been Lee kemudian menjadikan tujuan ini sebagai pengelompokkan dalam reformasi administrasi public. Pendapat lain berasal dari Hermawan, dkk (2015), reformasi dibagi ke dalam 3 bentuk yaitu reformasi procedural, structural, dan kultural. Lee menambahkan bahwa pemilihan terhadap reformasi apa yang akan dilakukan tergantung pada model birokrasi yang ada.

C. Daftar Pustaka

- Suwitri, Sri. 2007. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, Januari 2007 : 23-41.
- Basyaril, Salim. 2005. *Reformasi Administrasi dan Birokrasi Peradilan*. Penerbit FHUI: Jakarta.
- Budiman. 2005. *Reformasi Administrasi Negara*. Vol V Nomor 2 Agustus 2005 164:172, FIS Universitas Negeri Yogyakarta.

- Hermawan, Dany Cahyo, dkk. *Kebebasan di Era reformasi*, [diunduh pada tanggal 10 Juni 2023] dari [http://www.academia.edu /6206893/ KEBEBASAN_ DI_ ERA_ REFORMASI](http://www.academia.edu/6206893/KEBEBASAN_DI_ERA_REFORMASI).
- Meutia, Intan Fitri. 2017. *Reformasi Administrasi Publik*. CV. Anugrah Utama Raharja : Bandar Lampung.
- Mubarok. 2019. *Reformasi Administrasi Publik*. Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati. Bandung
- Tjokroamidjoyo B. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan - Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES.
- World Health Organization. Regional Office for South-East Asia. 2015. *WHO reform: Programmatic reform - focus on results - SEA/RC68/6*. WHO Regional Office for South-East Asia
- Zauhar, Soesilo. 2007. *Reformasi Administrasi, Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara.

BAB 8 | SEJARAH REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK

Yuni Annisa Listya Padmasari S.ST

Magister Kebidana Universitas Aiasyah Pringsewu

Email: yuniannisa72@gmail.com

A. Pendahuluan

Definisi administrasi seringkali hanya dipandang sebagai kegiatan tulis menulis secara fisik kegiatan administrasi memang banyak didominasi dalam kegiatan tulis menulis, baik menggunakan tangan, alat tulis, mesin ketik atau computer. Padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Administrasi dalam arti sempit sering disamakan dengan tata usaha, yaitu berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Sedangkan ruang lingkup administrasi sebenarnya sangat luas, yaitu menyangkut hal-hal apa saja yang termasuk dalam bahasa atau bagian daripada administrasi tersebut. Ruang lingkup ini sangat perlu diberi kepastian sehingga memudahkan kita membahas tentang administrasi itu sendiri. Ruang lingkup ini akan menjadi batas luasnya administrasi itu sendiri. (Adi, 2016)

Chandler dan Plano (1988:29) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola

2. Pelayanan public pemerintahan orde lama

Menurut Soebijanto (1984), pada masa pemerintahan orde lama hanya terdapat 12 sektor atau bidang pelayanan yang disediakan bagi masyarakat. Cakupan pelayanan public yang diselenggarakan oleh birokrasi orde lama pada masa itu lebih banyak terkait dengan penyediaan infrastruktur fisik. Berbagai sector atau bidang pelayanan yang diadakan oleh pemerintah, antara lain meliputi , pembangunan jalan dan jembatan, air minum, pasar, rumah sakit, pendidikan, transportasi, dan pertahanan. Pembangunan secara fisik, seperti pembangunan jalan raya atau rel kereta api, bagi pemerintahan dipandang lebih menguntungkan untuk dilakukan daripada pembangunan bidang non fisik, seperti pendidikan dan Kesehatan .(Putranto et al., n.d)

J. Daftar Pustaka

- Adi, P. (2016). *Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional*. 1.
- Anas, L. F. (n.d.). *Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*.
- Lidyawati, L., Rahmiati, P., & Sunarti, Y. (2018). Implementasi Filter Finite Impulse Response (FIR) Window Hamming dan Blackman menggunakan DSK TMS320C6713. *Elkomika: Jurnal Teknik Energi Elektrik, Teknik Telekomunikasi, & Teknik Elektronika*, 4(1), 16. <https://doi.org/10.26760/elkomika.v4i1.16>
- Meutia, I. F. (n.d.). *Reformasi Administrasi Publik*.
- Putranto, F. R., Yuniningsih, T., & Dwimawanti, I. H. (n.d.). *Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Banyumas*.
- Trilestari, E. W. (n.d.). *Reformasi Administrasi*.

BAB 9

MASALAH ADMINISTRASI PUBLIK

Ayu Lestari, S.Sos., M.A.P

Dosen Universitas Madako Tolitoli

Tolitoli, Sulawesi Tengah

Email: ayulestari@umada.ac.id

A. Pendahuluan

Administrasi publik di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia. dalam proses pelaksanaannya salah satu faktor yang dapat memenuhi unsur penting dalam proses pelaksanaannya yaitu sumber daya manusia ketercapaian proses tersebut akan sukses jika para pelaksana dan administrator yang di tunjuk mampu melaksanakan dengan baik.

Proses pelayanan publik ditujukan pada masyarakat secara umum. Layanan publik mencakup berbagai bentuk layanan jasa dan barang, yang diberikan oleh pemerintah secara berkelanjutan sebagai pemenuhan hak masyarakat secara umum. Layanan publik yang berkualitas merupakan salah satu standar majunya suatu proses pemerintahan pada suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sampai saat ini masih tergolong bermasalah dalam proses pelayanan publik baik dari fasilitas maupun sikap para pelaksana pelayanan yang dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal namun disisi lain tidak dibarengi dengan

G. Daftar Pustaka

- Agung, K. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik* (D. Juliantara (ed.); 1st ed.). Graha Ilmu.
- Ariani, A., & Gayatri, G. (2021). Good Governance, Kompetensi SDM, Budaya Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(10). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i10.p06>
- Hamid, O. A. (2011). *Otonomi daerah dan kualitas pelayanan publik*. 03(01), 535–546.
- Haning, M. T. (2018). Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 4(1), 25–37.
- Kartono, Riyadi, H., Insani, N., & Widiarti, A. (2022). Otonomi Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik Di Kelurahan Pakualam Serpong Utara Tangerang Selatan. *BHAKTI HUKUM : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 47–54. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JBH/article/view/17827>
- Lestari Ayu. (2022). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (Agus Hendrayady (ed.); 2022nd ed., Vol. 6). penerbit media sains indonesia (Cv Media Sains Indonesia).
- Ma'arif, S. (2017). *Konteks Politis Administratif Dalam Reformasi Pelayanan Publik Di Daerah Syamsul Ma'arif 1*. 4(1).
- Mahmudi. (2010). Akuntansi Sektor Publik Mahmudi Pdf Download Akuntansi Sektor Publik Mahmudi Pdf Download 1 / 3. *Akuntansi Sektor Publik*.
- Mahsyar, A. (2011). *Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik*. I(2), 81–90.

- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 11, 101-112.
- Pasolong, H. (2015). Kepemimpinan Birokrasi. Bandung. In *Alfabeta*.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik*. <https://Ombudsman.Go.Id/>.
- Widodo, J. (2001). Koleksi Buku 2001 Joko Widodo " Good governance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah / Joko Widodo " 2001. *Good Governance : Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*.

BAB 10 | REFORMASI APARATUR NEGARA

Surjanto, SKM.MKM

Widyaiswara Ahli Madya BKPSDM Kabupaten Sukabumi

Email: surjantokmmkm@gmail.com

A. Pendahuluan

Aparatur negara adalah alat kelengkapan negara, yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari (KBBI). Sedangkan reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi aparatur negara dapat diartikan secara harfiah sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan alat kelengkapan negara, terutama bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Reformasi aparatur negara ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih mampu dan responsif sehingga dapat lebih baik dalam melayani kebutuhan warga negara secara keseluruhan.

Di sisi lain terdapat istilah reformasi birokrasi yang dapat didefinisikan sebagai upaya pengembalian birokrasi pada fitrahnya, yakni memberi pelayanan terbaik pada masyarakat sesuai aturan-aturan yang sudah disepakati bersama (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2013). Meskipun demikian, sampai saat ini aparatur

reformasi dengan standar internasional atau praktik terbaik di negara-negara lain. Hal ini dapat membantu penilaian progress/kemajuan yang telah dicapai dan membantu solusi peningkatan pada masa mendatang.

6. Dapatkan umpan balik dari berbagai pihak

Umpan balik terhadap perubahan yang telah terjadi pasca reformasi aparatur negara dapat diperoleh dengan melibatkan berbagai pihak berkompeten dalam pelayanan publik, termasuk masyarakat, aparatur negara dan sektor swasta.

7. Identifikasi hambatan dan tantangan

Identifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan reformasi aparatur negara dapat membantu dalam pengidentifikasian wilayah/area yang memerlukan penguatan atau yang memerlukan perubahan strategi pelaksanaan reformasi.

8. Buat rekomendasi dan tindakan perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dibuat rekomendasi konkrit dan tindakan perbaikan untuk peningkatan hasil reformasi.

9. Monitor dan evaluasi terus-menerus

Reformasi aparatur negara adalah proses jangka panjang. Oleh karena itu perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa perubahan positif terus berlanjut dan tantangan dapat ditangani secara efektif.

D. Daftar Pustaka

Bappenas.R.I. (2020) 'Peraturan Presiden Republik Indonesia', *Demographic Research*, pp. 4-7.

Ghazali, A. *et al.* (2017) 'the Implementation of Law of State Apparatus (Asn) Based on Bureaucracy Reform: Gaps and Challenges', *Journal of International Business and Economics*, 17(1), pp. 7-18. Available at: <https://doi.org/10.18374/jibe-17-1.1>.

- Jochimsen.B (2009) 'Service Quality in Modern Bureaucracy: Parkinson's Theory at Work', *Kyklos*, 62(1), pp. 44–64.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2013) *Pemimpin & Reformasi Birokrasi*. Available at: <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/>.
- Maulana.A. et.al (2022) 'Analysis of Bureaucratic Reform Through Delayering of Government Institutions in Indonesia', *Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), pp. 155–170. Available at: <https://doi.org/10.24258/jba.v18i2.1003>.
- Wahyurudhanto (2020) 'Critical Reorientation of Bureaucratic Reform and Good Governance in Public Sector Administration in Indonesia', *Webology*, 17(2), pp. 308–316. Available at: <https://doi.org/10.14704/WEB/V17I2/WEB17033>.
- Williams.M.J. (2021) 'Beyond state capacity: Bureaucratic performance, policy implementation and reform', *Journal of Institutional Economics*, 17(2), pp. 339–357. Available at: <https://doi.org/10.1017/S1744137420000478>.

BAB 11 | REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Dr. Ade Iskandar, S.I.P, M.Si

Dosen Pascasarjana Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya

Email: ade.isk.tasik@gmail.com

A. Pelayanan Publik Dalam Perspektif NPM dan NPS

Reformasi yang telah berjalan di berbagai Negara menekankan pada tujuan efisiensi dan efektivitas serta kinerja yang berbasis hasil. Seperti dikemukakan Haque bahwa : *“This current reform emphasizes the goal of efficiency and effectiveness, supportive or facilitating role, disaggregated and flexible managerial structure, result-based performance, promarket policies, customer orientation, and business sector norms”*. (Haque, 2008). Reformasi dilaksanakan pada semua bidang dengan tujuan untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektivitas, mendukung atau memfasilitasi peran, struktur manajerial yang terpilah dan fleksibel, kinerja berbasis hasil, kebijakan promarket, orientasi pelanggan, dan norma sektor bisnis.

Konsep *“Re-inventing Government”* Osborne dan Gaebler membawa konsep baru dalam proses reformasi birokrasi demikian juga dengan Hood yang menyajikan konsep mengenai prinsip-prinsip *New Public Management*. Reformasi birokrasi di berbagai Negara dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan kondisi Negara tersebut. Terlepas dari system administrasi Negara yang telah dijalankan, model New

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi pelayanan prima, cepat, dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi yang murah dan mudah diakses masyarakat diarahkan menuju Digital Services.

Reformasi administrasi melibatkan berbagai unsur dalam negara, institusi publik, swasta maupun unsur lainnya yang semuanya dimotivasi untuk mencapai tujuan bersama terutama dalam memecahkan masalah-masalah publik. Yang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap pelayanan publik adalah Negara, karena Negara merupakan penjamin utama pelayanan publik. Seperti dikemukakan bahwa : “...*the sovereign nation-state has been taken for granted as the chief guarantor of public services*” (Jerri Killian, 2008).

E. Daftar Pustaka

- Alexander Kouzmin and John Dixon. (2006). Neoliberal Economics, Public Domains, and Organizations : Is There Any Organizational Design after Privatization ? In T. D. and P. L. C. Lynch (Ed.), *Handbook of Organization Theory and Management* (2nd ed., pp. 668–726). Taylor & Francis Group.
- Feldheim, M. A. (2001). Downsizing in the Public Sector : Implications for Public Administration. In Kuotsai Tom Liou (Ed.), *Handbook of Public Management Practice and Reform* (1st ed., pp. 493–512). Marcel Dekker.Inc.
- Haque, M. S. (2008). Administrative Reform in Southeast Asia. In Evan M. Berman (Ed.), *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (2nd ed., pp. 66–75). Taylor & Francis Group.
- Jeroen Maesschalck. (2008). Ethics and Administrative Reform. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (pp. 686–690).

- Jerri Killian, N. E. (2008). Globalization, Europeanization, and Administrative Reform. In *Handbook of Administrative Reform An International Perspective* (1st ed., pp. 8–21). Taylor & Francis Group.
- John P. Tuman, John Hinderer, D. R.-J. (2001). Deregulation Policy and Public Management. In Kuotsai Tom Liou (Ed.), *Handbook of Public Management Practice and Reform* (1st ed., pp. 431–445). Marcel Dekker. Inc.
- Liou, K. T. (2001). Introduction. In *Handbook of Public Management Practice and Reform* (Issue 1, pp. i–xix). Marcel Dekker Inc.
- Marc Holzer and Kathe Callahan. (2001). Productivity Improvement and Public Management. In Kuotsai Tom Liou (Ed.), *Handbook of Public Management Practice and Reform* (pp. 291–319). Marcel Dekker. Inc.
- Mary E. Guy. (2000). Public Management. In Jay M. Shafritz (Ed.), *Defining Public Administration* (1st ed., pp. 161–168). Westview Press.
- Rainey, H. G., & Rainey, H. G. (1979). *Perceptions of Incentives in Business and Government: Implications for Civil Service Reform* *. 39(5), 440–448.
- Rhodes, R. A. W., Carmichael, P., & J. McMillan and A. Massey. (2003). *Decentralizing the Civil Service* (First Publ). Open University Press Buckingham Philadelphia.
- Steven W. Hay, J. E. S. (2017). Changes in State Civil Service Systems : A National Survey. In J. S. Bowman & Jonathan P. West (Eds.), *American Public Service: Radical Reform and the Merit System* (pp. 3–21). Taylor & Francis Group.
- Thomas D. Lynch, P. L. C. (2006). *Handbook of Organization Theory and Management: The Philosophical Approach* (Issue 1). Taylor & Francis Group.

Victor G. Hilliard. (2002). The Role of Human Resource Management in South African Public Service Reform. In Ali Farazmand (Ed.), *Administrative Reform in Developing Nations* (pp. 179–201). Praeger.

Peraturan perundang-undangan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

BAB 12 | REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
Email: jbr.nyonk1@gmail.com

A. Makna dan Fokus Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Reformasi atau "*reformation*" bermula dari kata "*to reform*" tidak hanya bermaksud meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi, misalnya melalui pemangkasan, desain ulang atau perampingan, tetapi lebih dari itu reformasi birokrasi bertujuan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan memperkuat pelayanan sipil dan pelayanan publik di dalam masyarakat.

Dalam hal ini dapat diidentifikasi lima sasaran reformasi birokrasi yaitu: 1. Definisi birokrasi, 2. Fungsi birokrasi, 3. Lingkungan birokrasi, 4. Proses birokrasi dan 5. Perilaku Birokrasi. Reformasi birokrasi pemerintahan dalam upaya rekonstruksi, reorientasi, revitalisasi dan pengembangan birokrasi pemerintahan baik dari aspek sistem, individu, kelembagaan pemerintahan dan lingkungan pemerintahan. Pada prinsipnya pembaharuan birokrasi pemerintahan dari pandangan teori organisasi dan manajemen bertujuan untuk pengembangan organisasi pemerintahan untuk mewujudkan legitimasi, kesehatan, pertumbuhan, kepribadian dan citra organisasinya dalam mencapai tujuan pemerintahan negara.

H. Daftar Pustaka

- Asmawi Rewansyah, 2010, *Reformasi Birokrasi Dalam Good Governance*, PT.Yusaintanas Prima, Jakarta
- Sp. Siagian, 1994, *Patologi Birokrasi (analisis, Identifikasi dan Terapinya)*, Ghaliliea Indonesia, Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, 2007, *Kybernologi: Sebuah Charta Pembaharuan*, Sirao Credentia Center, Tangerang- Banten
- Toha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Perkasa Press
- Yuningsih, Tri. 2019. *Kajian Birokrasi*. Semarang: Departemen Administrasi Publik Press.

BAB 13 | REFORMASI KINERJA

Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si.

Dosen Pascasarjana Universitas Nasional

Email: syamsiah_badruddin@civitas.unas.ac.id

Reformasi Kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan layanan publik dalam konteks Reformasi Administrasi Publik. Ini melibatkan perubahan sistemik yang meningkatkan tata kelola dan hasil organisasi publik. Dengan fokus pada pengukuran kinerja, pembangunan kapasitas, dan pengelolaan sumber daya, Reformasi Kinerja berupaya membangun tata kelola yang responsif dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada hasil, partisipasi publik, dan efisiensi sumber daya di dalam pemerintahan. Tujuan utama Reformasi Kinerja adalah membantu administrasi publik beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi sambil tetap menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas guna memajukan masyarakat.

A. Ruang Lingkup Reformasi Kinerja

Reformasi Kinerja merujuk pada upaya transformasi sistemik yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas hasil yang dihasilkan oleh lembaga dan organisasi publik. Reformasi Kinerja bertujuan untuk mengubah cara kerja dan budaya organisasi, memperkenalkan

E. Daftar Pustaka

- Armstrong, M., & Taylor, S. (2020). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice* (11th ed.). Kogan Page Publishers.
- Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American Psychologist*, 44(9), 1175.
- Bouckaert, G., & Halligan, J. (2007). *Managing performance: International comparisons*. Routledge.
- Bouckaert, G., & Van Dooren, W. (2003). Performance measurement and management in public sector organizations. *Public Management and Governance*, 127–136.
- Boyle, R. (2006). *Measuring Public Sector Productivity: Lessons from International Experience*.
- Cole, G. A., & Kelly, P. (2011). *Management: Theory and practice* (7th ed.). Cengage Learning EMEA.
- Considine, M., Lewis, J. M., & Alexander, D. (2009). *Networks, innovation and public policy: Politicians, bureaucrats and the pathways to change inside government*. Springer.
- Ferlie, E., Lynn Jr, L. E., & Pollitt, C. (2005). *The Oxford handbook of public management*. Oxford University Press.
- John, P. (2013). *Analyzing public policy*. Routledge.
- Latham, G. P., & Locke, E. A. (1979). Goal setting—A motivational technique that works. *Organizational Dynamics*, 8(2), 68–80.
- Lewis, J. M., & Triantafillou, P. (2012). From performance measurement to learning: A new source of government overload? *International Review of Administrative Sciences*, 78(4), 597–614.

- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2010). *Human resource management*. Cengage Learning.
- Ministry of Education. (2023). *Speech by Minister Chan Chun Sing at the Institute of Policy Studies Singapore Perspectives 2023*. [Www.Moe.Gov.Sg/](https://www.moe.gov.sg/news/speeches/20230105-speech-by-minister-chan-chun-sing-at-the-institute-of-policy-studies-singapore-perspectives-2023).
<https://www.moe.gov.sg/news/speeches/20230105-speech-by-minister-chan-chun-sing-at-the-institute-of-policy-studies-singapore-perspectives-2023>
- Nel, P. S., Werner, A., Du Plessis, A., Ngalo, O., Poisat, P., Sono, T., Van Hoek, L., & Botha, C. (2011). *Human resources management: Oxford University Press. South Africa*.
- Peci, A., Avellaneda, C. N., & Suzuki, K. (2021). Governmental responses to COVID-19 Pandemic. In *Revista de Administração Pública* (Vol. 55, pp. 1–11). SciELO Brasil.
- Peters, B. G. (2018). *American public policy: Promise and performance*. Cq Press.
- Pollitt, C. (2003). *The essential public manager*. McGraw-Hill Education (UK).
- van Der Wal, Z., & Demircioglu, M. A. (2020). Public sector innovation in the Asia-pacific trends, challenges, and opportunities. *Australian Journal of Public Administration*, 79(3), 271–278.
- Van der Wal, G. (2004). *Managing performance in the public sector: concepts, considerations and challenges*. Juta and Company Ltd.
- Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector*. Routledge.
- Yew, L. K. (2012). *From third world to first: The Singapore story, 1965-2000*. Marshall Cavendish International Asia Pte Ltd.

BAB 14 | REFORMASI ORGANISASI

Dr. Ani Heryani, S.Sos, M.Si

Dosen Pascasarjana Administrasi Negara

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya

Email: aniheryani248@gmail.com

A. Reformasi Sektor Publik

Pergeseran paradig administrasi publik dari Old Public Administration kepada New Public Management dan New Public Service telah membawa perubahan yang sangat banyak bagi perkembangan organisasi pemerintahan. Paradigm *Old Public Administration* yang memberikan fokus perhatian bahwa penyampaian layanan secara langsung dilakukan oleh badan-badan pemerintah, serta kebijakan dan administrasi publik yang berfokus pada satu tujuan yang ditentukan secara politis. Pemikiran *New Public Management* telah merubah pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu kepada ide dan praktik kontemporer yang menggunakan pendekatan sektor swasta dan bisnis di sektor publik serta penggunaan mekanisme pasar. Pada praktiknya, pemikiran New Public Management telah ditunjukkan berupa upaya organisasi pemerintah dalam menciptakan efektivitas, efisiensi dan pemerintahan yang berorientasi hasil.

Penyederhanaan struktur merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan menuju Smart Institution.

D. Daftar Pustaka

Farazmand, A. (2002). Administrative Reform and Development: An Introduction. In *Administrative Reform in Developing Nations* (p. 280). Praeger.

Jerri Killian, N. E. (2008). Globalization, Europeanization, and Administrative Reform. In *Handbook of Administrative Reform An International Perspective* (1st ed., pp. 8-21). Taylor & Francis Group.

Liou, K. T. (2001). Introduction. In *Handbook of Public Management Practice and Reform* (Issue 1, pp. i-xix). Marcel Dekker Inc.

Styhre, A. (2007). *The Innovative Bureaucracy*. Roulledge Taylor & Francis Group.

Travers, M. (2007). The new bureaucracy: Quality assurance and its critics. In *The New Bureaucracy: Quality Assurance and its Critics*. The Policy Press University of Bristol.

UNDP Programme, U. N. D. (2003). *Public Administration Reform (practice note)*.

Vinod Thomas, I. E. G. (2008). Public Sector Reform: What Works and Why? An IEG Evaluation of World Bank Support. In *An IEG Evaluation of World Bank Support*. The World Bank.

Peraturan perundang-undangan

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

TENTANG PENULIS

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si



Lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang ilmu Pemerintahan, Administrasi, Politik, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.

Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com atau adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301.



Aulia Rahmawati, S.A.N.,M.Si

adalah dosen tetap Program Studi Administrasi Publik Universitas Bandar Lampung (UBL). Lahir di Tangerang, 11 Januari 1992. Memperoleh gelar Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 2017. Sementara gelar sarjana diraih dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Bandar Lampung (UBL) tahun 2014. Sebelum berkarir sebagai dosen (2022) penulis menjadi praktisi sebagai Koordinator Daerah Program Nasional Bantuan Pangan Pada Kementerian Sosial RI (2018-2022). Saat ini penulis sedang terlibat sebagai Tenaga Ahli dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung mengenai Keterbukaan Informasi Publik di bawah Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan UBL.



Masayu Nila Juwita, S.I.P., M.Si Lahir di Bandar Lampung, 8 April 1991. Bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung. Anak pertama dari tiga bersaudara. Menikah tahun 2017 dengan Hendi Safutra, S.Pt.. Menempuh pendidikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung, dilanjutkan di SMP Negeri 2 Bandar Lampung, kemudian SMA Negeri 10 Bandar Lampung. Selanjutnya jenjang S1 ditempuh di Universitas Sriwijaya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik dan S2 Program Studi Magister Ilmu Administrasi di Universitas Bandar Lampung. Saat ini penulis merupakan dosen Program Studi Universitas Bandar Lampung dan dipercaya sebagai Sekretaris Program Studi Administrasi Publik di Universitas Bandar Lampung. Pernah menjadi *Presenter International Conference On Research Collaboration 2023*, Aktif menulis artikel ilmiah beberapa diantaranya *Government Policy In Overcoming Religious Extremism In Indonesia: A Multidisciplinary Review Between Public Administration And Psychology ; Implementation of Internship Program as A Form of MBKM Learning Activities in Improving Students' Competency ; The Quality of Human Resources in Improving Community in Bandar Lampung City* dan beberapa artikel ilmiah dapat dilihat di https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xdx-CAoAAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&sortby=pubdate



Ir. Tungga Bhimadi Karyasa, M.

T. lahir di kota pecel Madiun tanggal 31 Agustus 1961, adalah dosen yayasan pada Program Studi Sarjana Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Gajayana, menyelesaikan pendidikan S1 sebagai Sarjana Teknik Mesin Sub Jurusan Teknik Penerbangan (sekarang menjadi Jurusan Teknik

Dirgantara) Institut Teknologi Bandung lulus 22 Desember 1986, dan menyelesaikan pendidikan S2 sebagai Magister Teknik Mesin Bidang Rekayasa dan Manufaktur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Lulus Tahun 20 Maret 1998. 8(delapan) tahun sebagai **karyawan** PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara atau PT-IPTN Bandung, kemudian hijrah ke Surabaya sebagai **dosen** yayasan Teknik Mesin Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya atau ITATS sampai tahun 2014, dan kemudian dosen yayasan Teknik Mesin Universitas Gajayana Malang atau UNIGA sampai sekarang. Pekerjaan selain dosen, parallel sebagai **konsultan** dengan 5(lima) Level Utama Sertifikat Keahlian Khusus (SKK) dari **Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)** untuk konsultan bidang: Mekanikal, Mekanikal SLF, Manajemen Konstruksi, Sistem Tata Udara, dan Sistem Proteksi Kebakaran. Dalam **organisasi profesi** sebagai pengurus pada Perhimpunan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia (PAPTI) Jawa Timur sejak tahun 2018 sampai tahun 2023, Buku yang sudah diterbitkan antara lain adalah: Dasar-dasar Getaran Mekanis, Konsep Teknologi, Kapita Selekta Penelitian (yang sudah dilakukan), Sistem Pemeliharaan Berbasis Keandalan (aplikasi pada kapal tanker), Berkontribusi dalam Book Chapter ini karena, bahasan **Idea Reformasi dalam Administrasi Publik** menarik untuk memunculkan gagasan dan idea sebagai sumbangsih pemikiran.



Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si lahir pada 05 Agustus 1973 di Tanjungpinang, sebuah Kota kecil yang kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah Dasar Negeri 001 ditamatkan pada tahun 1986, SMP Negeri 2 ditamatkan tahun 1989, dan SMA Negeri 1 ditamatkan tahun 1992, yang kesemuanya di Kota Tanjungpinang.

Merantau ke Pontianak Kalimantan Barat untuk kuliah di Fisip Universitas Tanjungpura dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara dari tahun 1992 – 1997. (mendapatkan gelar S.Sos). gelar Magister Sains (M.Si), didapat pada kampus yang sama pada Program Magister Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Administrasi Pembangunan dari tahun 2004 – 2006.

Buku-buku yang telah penulis hasilkan adalah Buku Etika Administrasi Negara, Buku Komunikasi Administrasi, Book Chapter Pengantar Ilmu Komunikasi, Book Chapter Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Book Chapter Perilaku Organisasi (Konsep, Teori dan Aplikasi), Book Chapter Pendidikan Budaya Anti Korupsi, Book Chapter Pengantar Ilmu Administrasi Publik, Book Chapter Pengantar Manajemen, Book Chapter Perilaku Organisasi (Dari Konsep, Teori Menuju Aplikasi), Book Chapter Teori Administrasi, Book Chapter Teori Administrasi Publik, Book Chapter Perilaku Organisasi : Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi, Pendidikan Anti Korupsi, Pengantar Manajemen (Optimalisasi Kinerja Organisasi), Dasar-Dasar Ilmu Manajemen, Manajemen Pelayanan Publik, Reformasi Administrasi Publik, dan Perilaku Keorganisasian, serta Mengenal Ilmu Komunikasi. Namun karya tulis berupa tulisan-tulisan baik dilakukan secara individual maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun dengan mahasiswa sudah seringkali dimuat di beberapa jurnal, seperti Jurnal Ilmu Terapan Kopertis Wilayah X, Jipp Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Umrah, Juan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Umrah, Jurnal Perbatasan Fisip Umrah, Jurnal Kemudi, Jurnal Jiana Universitas Riau, dan lain-lain.

Adapun jabatan yang pernah penulis duduki adalah Sekretaris Perpustakaan, Sekretaris Program Studi, Ketua Program Studi, Pembantu Ketua III, Pembantu Dekan III, dan Pembantu Dekan I, dan juga menjadi pengurus IAPA untuk wilayah Kepulauan Riau. Saat ini menjabat sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Penulis juga telah tersertifikasi oleh (Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai penyunting naskah (copy editing), dan aktif menjadi editor pada beberapa buku.

Email Penulis: agushendrayady5873@umrah.ac.id



Dr. Malik, M.Si lahir di Kendari pada tanggal 16 Oktober 1966, Manamatkan pendidikan SD, SMP di Kendari, SMA di Sekolah khusus olahragawan Ragunan Jakarta Selatan. Menamatkan pendidikan S-1 di Univ. Halu Oleo Kendari tahun 1990, Jurusan Administrasi Negara.

Pada tahun 2003 menyelesaikan pendidikan S-2 di Unpad Bandung Bidang Ilmu Sosial, BKU Ilmu Administrasi dan S3 Bidang Administrasi Publik juga diselesaikan di Unpad Bandung tahun 2009. Menulis buku Administrasi Pembangunan, Metode Penelitian Sosial, Kepemimpinan dan motivasi, Kebijakan Pemerintah Lokal Kontemporer, Metode Penulisan Ilmiah, Penerapan Kompetensi Pedagogik Untuk Pengukuran Kinerja Guru, Filsafat Administrasi, Administrasi dan Manajemen, Otonomi Daerah, Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia, dan melakukan penelitian tentang Organisasi Publik, Kebijakan Pemerintah, E-Government maupun Kebijakan Publik, yang diterbitkan pada jurnal-jurnal Lokal, Nasional maupun Internasional. Penulis pernah menjabat Dekan FIA pada Universitas Lakidende, Menjadi Ketua Lembaga Penelitian Unilaki, mengajar dan membimbing baik S1, S2 maupun S3 di Univ. Lakidende, Pascasarjana Adm. Pembangunan Univ. Halu Oleo, Pascasarjana Adm. Publik Untirta, Univ. Terbuka, dan Pascasarjana Undip, Pascasarjana MIA UBL. Saat ini sebagai Dosen di Universitas Bandar Lampung (UBL) FISIP S-1 dan S-2 Magister Ilmu Administrasi (MIA) dan Kini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi pada MIA, serta menjadi Kepala Bidang Kajian Kebijakan Publik pada Universitas Bandar Lampung. E-mail: malik@ubl.ac.id



Dwi Andriyani, S.Sos., M.Si lahir di Tanjung Raja yaitu salah satu Kabupaten Ogan Ilir di provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 Agustus 1989. Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 13 Tanjung Raja, melanjutkan Sekolah Menengah di SMP Negeri 1 Tanjung Raja, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA YPPG Tanjung Raja. Kemudian Pada tahun 2008 telah menyelesaikan Sarjana Administrasi (S.Sos) jurusan Administrasi Negara di Universitas Sjakhyakirti. Selanjutnya berhasil menyelesaikan Magister Administrasi Publik Universitas Sjakhyakirti Pada Tahun 2012 Kegiatan sehari hari saat ini adalah aktif mengajar di Universitas Sjakhyakirti Palembang Pada Fakultas Ilmu Administrasi.



Yuni Annisa Listya Padmasari,
S.ST, M.Keb Lahir disukaraja tiga 03 juni
1990. Alamat: desa bumi mulyo,rt/rw
002/006 kec,sekampung udik,kab.
Lampung timur. Anak pertama dari 3
bersaudara. Lahir dari keluarga sederhana;
bapak toha dan Ibu aminah. Menikah
tahun 2013 dengan Nanang Ardi

Arianto,SH., memiliki dua putri; Eddies Azzahra Ariant Mahiraqil
dan Aishwa Nahla Ariant Mahiraqil. Menempuh pendidikan di SD
Negeri 3 sukaraja tiga, SMP Miuhamadiyah sukadana,lampung
timur , SMAN 1 Sekampung , D3 Kebidanan di stikes Estu Utomo
Boyolali, D4 Kebidanan di Universitas malahayati Bandar
Lampung, S2 Kebidanan Di Universitas Aisyah Pringsewu.



Ayu Lestari, S.Sos., M.A.P., Lahir di Tolitoli 28 maret 1992. Alamat: Desa Buntuna kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah. Lahir dari keluarga petani; bapak Moh Safar dan Ibu Dai Saria. Menempuh pendidikan S1 Administrasi Negara di Universitas Madako Tolitoli dan melanjutkan Studi Pasca Sarjana (S2) Universitas Tadulako pada tahun 2014 pada Program Studi Administrasi Publik dengan konsentrasi Kebijakan Publik. Saat ini penulis aktif sebagai salah satu Dosen Universitas Madako Tolitoli pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



Surjanto, SKM.MKM lahir di Jombang tanggal 24 Maret 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kesehatan Lingkungan, Poltekes Yapkesbi Sukabumi dan Widyaiswara Ahli Madya di BKPSDM Kabupaten Sukabumi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara Barat dan melanjutkan S2 pada Jurusan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Penulis telah aktif menjadi tenaga fungsional Kesehatan semenjak tahun 1993 di kabupaten Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini penulis aktif melaksanakan tri dharma perguruan tinggi di Politeknik Kesehatan Yapkesbi Sukabumi dan menjadi Widyaiswara Ahli Madya pada BKPSDM Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat. Penulis dapat dihubungi melalui email: sujantoskmmkm@gmail.com



Dr. Ade Iskandar, S.I.P., M.Si lahir di Tasikmalaya, 13 Maret 1969. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya (STISIP Tasikmalaya), Magister Ilmu Administrasi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembinaan

Perguruan Tinggi Tasikmalaya (STIA YPPT Tasikmalaya) dan pada Tahun 2014 berhasil menyelesaikan Program Doktor Bidang Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya (STISIP Tasikmalaya) sampai dengan tahun 2017 dan saat ini menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Tasikmalaya (STIA YPPT Tasikmalaya).

Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kuantitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQnR (Certified International Quantitative Research). Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang pemerintahan, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis buku dan artikel di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks bahkan tulisannya telah diterbitkan di Jurnal Internasional bereputasi.

Book chapter yang pernah ditulis : Governansi Digital, Good Governance, Penerapan dan Implementasi Big Data di Berbagai Sektor, Otonomi Daerah, Administrasi Pembangunan, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Pemerintah, Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia, Kebijakan Publik : Dari Sejarah, Teori, Proses dan Prakteknya.

Google Scholar :

<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=zLYU2CEAAAJ>

id sinta : 6685309

Email Penulis: ade.isk.tasik@gmail.com



Abdul Jabbar, S.I.P., M.Si lahir pada tanggal 18 Agustus 1991 di Pangkajene, Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan. Menempuh dan menyelesaikan SD Negeri 4 Pangsid Tahun 2003, MTs Negeri Pangsid Tahun 2006, SMA Negeri 1 Pangsid Tahun 2009, S1 STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2014 Prodi Ilmu Pemerintahan. S2 UNHAS Tahun 2016 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNHAS Makassar.

Pengalaman Kerja - Pernah sebagai Jurnalis Mitra TV Ajatappareng, Konsultan Smart Community, Direktur FORMASI Institute, Direktur CV Indovisi Mitra Mandiri, Founder Jasa Layanan Sampah "Pappulung Aroppoe" dan saat ini sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2019 - 2023 di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Organisasi - Pernah sebagai Kallolona Sidenreng Rappang Tahun 2008, Ketua BEM STISIP Muhammadiyah Rappang Tahun 2010 - 2011, Koorda BEM PTM Sulselbar, 2011 - 2012, Presidium Nasional BEM PTM Indonesia Timur Tahun 2012 - 2013, Ketua PC. IMM Sidrap Tahun 2013 - 2014, Sekretaris DPD IMM Sulawesi Selatan tahun 2014 - 2016, Ketua HIPMI PT Sidrap Tahun 2014 - 2017, Ketua Relawan Muda Sulsel (RMS) 2017 - 2020, Ketua DPW Pemuda LIRA Sulawesi Selatan Tahun 2014 - 2017, Ketua DPD KNPI Sidrap Tahun 2017 - 2020, , Ketua DPC Pemuda Tani HKTI Sidrap Tahun 2021 - 2026. Sekarang juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM), Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orda Sidrap.

Pengalaman Penelitian - Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari KemendikbudRistek/Kemenristekdikti, dan internal Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan kolaboratif di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding Nasional bereputasi, serta memperoleh beberapa HAKI.

Pengalaman dalam program-program Pemberdayaan Masyarakat diantaranya sebagai narasumber/pemateri di berbagai kegiatan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional. Selain itu, aktif juga dalam membentuk dan mendampingi beberapa desa binaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



Prof. Dr. Syamsiah Badruddin, M.Si. meraih gelar Sarjana Pendidikan (1987) dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Ujung Pandang, Magister Kependudukan dan Keluarga Berencana (1997) dan Doktor Ilmu Sosial (2004) Universitas Hasanuddin. Saat ini sebagai Guru Besar pada Program Studi Sosiologi di Universitas Nasional. Saat ini beliau memimpin tim penelitian hibah dan pengabdian kepada masyarakat dari Kementerian Pendidikan Indonesia sejak tahun 2022 di bidang sosial, keberlanjutan dan digitalisasi pendidikan. Energi terbarukan. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKPI) Sulawesi Selatan. Bendahara Umum DPP ADRI (Pakar dan Dosen Republik Indonesia), Wakil Ketua Perkumpulan ADRI DPD Sulselbar, Kepala Riset dan Publikasi IPEST (Peneliti Internasional bidang Ekonomi, Sosial dan Teknologi), penulis 32 dokumen Scopus.). Beliau merupakan pendiri beberapa e-journal, yaitu JILPR (Indonesia Law and Policy Policy) dan IJESS (International Journal of Education and Social Science). Selain itu, saat ini juga terlibat dalam proyek penelitian SOCIO RENEWABLE VILLAGE penguatan sosial energi bersih terbarukan mendukung ketahanan pangan pedesaan.

syamsiah_badruddin@civitas.unas.ac.id

081342349767



Dr. Ani Heryani, S.Sos., M.Si lahir di Tasikmalaya, 21 September 1970. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Administrasi Negara STIA Tasikmalaya Tahun 1994, Magister Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2003, dan pada Tahun 2009 berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya sejak tahun 1994, pernah menjadi Dosen Tidak Tetap di STISIP Tasikmalaya, di STISIP Bina Putera Banjar, Universitas Subang dan Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon. Tahun 2014-2022 memperoleh tugas tambahan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya.

Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain Dewan Pakar KPPI, Presidium KAHMI Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Penasihat TULIP (Teras Untuk Literasi Perempuan). Aktif pula sebagai narasumber di berbagai Seminar, bimbingan teknis maupun diklat.

Penghargaan yang pernah di raih antara lain Gender Champion Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kualitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQaR (Certified International Qualitative Research) dan CPHCM (Certified Profesional Human Capital Management). Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang sosial politik, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis buku, book chapter dan artikel di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks dan telah menerbitkan tulisannya di Jurnal Internasional bereputasi.

Google Scholar :

<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=IzIHFTEAAAAJ>